

**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA  
ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP  
PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL DI KABUPATEN/KOTA  
DI YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 2007-2013**



**NASKAH PUBLIKASI**

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas Dan Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar  
Sarjana Ekonomi Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi  
Universitas Muhammadiyah Surakarta

**Disusun oleh:**

**ASRUL WISNU SETIAWAN**

**B 200100085**

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SURAKARTA**

**2015**

**PENGESAHAN**

Yang bertanda tangan di bawah ini telah membaca naskah publikasi dengan judul :

**“PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KUSUS DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL DI KABUPATEN/KOTA DI YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 2007-2013”**

Yang disusun oleh :

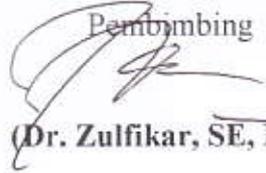
**ASRUL WISNU SETIAWAN**

**B 200 100 085**

Penandatanganan berpendapat bahwa naskah publikasi tersebut telah memenuhi syarat untuk diterima.

Surakarta Maret 2015

Pembimbing

  
**(Dr. Zulfikar, SE, M.S)**

Mengetahui,

Dekan fakultas Ekonomi dan Bisnis

Universitas Muhammadiyah Surakarta

  
**(Dr. Triyono, SE, Ak, M.Si)**



**PENGARUH PERTUMBUHAN EKONOMI, PENDAPATAN ASLI DAERAH, DANA  
ALOKASI UMUM, DANA ALOKASI KHUSUS DAN DANA BAGI HASIL TERHADAP  
PENGALOKASIAN ANGGARAN BELANJA MODAL DI KABUPATEN/KOTA  
DI YOGYAKARTA PERIODE TAHUN 2007-2013**

**ASRUL WISNU SETIAWAN**

**B200100085**

**Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis**

**Universitas Muhammadiyah Surakarta**

**ABSTRAKSI**

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap pengalokasian anggaran belanja modal di kabupaten dan kota di wilayah Yogyakarta periode tahun 2007-2013.

Dalam Penelitian ini metode pengambilan sampel yang digunakan adalah tehnik sampling jenuh dimana seluruh populasi akan dijadikan sampel penelitian. Sampel yang diperoleh dan digunakan dalam penelitian ini sejumlah 35 Laporan Relisasi APBD kabupaten/kota, APBD Kabupaten/kota Yogyakarta dengan periode tahun 2007-2013. Variabel yang diuji dalam penelitian ini adalah belanja modal, Pertumbuhan Ekonomi (PDRB) , Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH). Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah metode analisis regresi linier berganda.

Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Pertumbuhan Ekonomi (PDRB), Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK) berpengaruh secara persial dan signifikan terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Sedangkan dana bagi hasil tidak mempunyai pengaruh secara signifikan terhadap pengalokasian Anggaran Belanja Modal.

Kata Kunci: *Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil dan Belanja Modal*

## **A. PENDAHULUAN**

Salah satu asas pembangunan daerah adalah desentralisasi, menurut ketentuan umum UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, desentralisasi yaitu penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia. Perwujudan dari asas desentralisasi adalah berlakunya otonomi daerah. Prinsip otonomi daerah menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam arti daerah diberi kewenangan mengurus dan mengatur semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat. Daerah memiliki kewenangan membuat kebijakan daerah untuk memberi pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa, dan pemberdayaan masyarakat yang bertujuan pada peningkatan kesejahteraan masyarakat Maryati dan Endarwati, (2010)

Implementasi otonomi daerah di Indonesia ditandai dengan desentralisasi fiskal, yaitu pelimpahan kewenangan di bidang keuangan dengan proses pengalihan sumber keuangan bagi daerah dalam jumlah yang sangat signifikan. Pembentukan daerah baru atau pemekaran wilayah terjadi secara luas, tidak hanya terjadi pada daerah yang secara geografis kaya akan sumber daya alam ataupun memiliki potensi industri dan perdagangan yang dapat diandalkan sebagai sumber penerimaan

daerah, tetapi juga terjadi pada daerah yang miskin sumber daya alam dan terbelakang secara ekonomi, sehingga pada akhirnya pemekaran tersebut menjadi beban fiskal bagi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Oktora dan Pontoh, (2013)

Dampak pelaksanaan otonomi daerah adalah tuntutan terhadap pemerintah dalam menciptakan *good governance* sebagai prasyarat dengan mengedepankan akuntabilitas dan transparansi. Lingkup anggaran menjadi relevan dan penting di lingkungan pemerintah daerah karena terkait dengan dampak anggaran terhadap kinerja pemerintah, sehubungan dengan fungsi pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat Indarti dan Sugiartina (2012). Pertumbuhan ekonomi mendorong pemerintah daerah untuk melakukan pembangunan ekonomi dengan mengelola sumber daya yang ada dan membentuk suatu pola kemitraan dengan masyarakat untuk menciptakan lapangan pekerjaan baru yang akan mempengaruhi perkembangan kegiatan ekonomi dalam daerah tersebut (Kuncoro, 2004) dalam (Arwati dan Hardiati, 2013).

Dengan adanya otonomi daerah pula, maka dengan tegas terjadi pemisahan fungsi antara fungsi Pemerintahan Daerah (Eksekutif) dengan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Legislatif). Berdasarkan pembedaan fungsi tersebut, menunjukkan bahwa antara legislatif dan eksekutif terjadi hubungan keagenan, eksekutif melakukan perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan atas anggaran daerah, yang merupakan

manifestasi dari pelayanan kepada publik, sedangkan legislatif berperan aktif dalam melaksanakan legislasi, penganggaran, dan pengawasan (Halim, 2006) dalam (Arwati dan Hardiati, 2013).

Untuk menyelenggarakan otonomidaerah yang nyata dan bertanggung jawab diperlukan kewenangan dankemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang didukung olehperimbangan keuangan antarapemerintah pusat dan daerahMaryati dan Endrawati, (2010).

Penelitian ini mengembangkan dari artikel Pengaruh Pertumbuahn Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Di Kota Semarang Periode Tahun 2005-2009 dalam Indarti dan Sugiartiana, (2012). Berdasarkan Keterbatasan dalam Indarti dan Sugiartiana, (2012) Peneliti menambah variabel independen yaitu Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil. Sehingga bisa melengkapi variabel independen serta kota dan tahun penelitian ini dilakukan di Yogyakarta tahun periode 2007-2013.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **Anggaran Belanja Modal**

Belanja Modal adalah pengeluaran yang manfaatnya cenderung melebihi satu tahun anggaran dan akan menambah jumlah aset atau kekayaan organisasi sektor publik, yang selanjutnya akan menambah anggaran operasional untuk biaya pemeliharaannya Nordiawan, (2006: 50) dalam Indarti dan Sugiartiana, (2012). Berdasarkan PP RI No. 24 Tahun 2005 tentang Laporan Realisasi Anggaran, Belanja modal adalah pengeluaran anggaran untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi (SAP, 2005:94). Belanja modal meliputi belanja modal untuk perolehan tanah, gedung dan bangunan, peralatan dan aset tidak berwujud. Belanja modal dimaksudkan untuk mendapatkan aset tetap pemerintah daerah, yakni peralatan, bangunan, infrastruktur, dan harta tetap lainnya. Secara teoritis ada tiga cara untuk memperoleh aset tetap tersebut, yakni dengan membangun sendiri, menukarkan dengan aset tetap lainnya, atau juga dengan membeli Indarti dan Sugiartiana, (2012).

### **Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan jangka panjang secara perlahan dan mantap yang terjadi melalui kenaikan tabungan dan penduduk. Sedangkan menurut Nanga (2001:279) dalam Indarti dan Sugiarto, (2012). pertumbuhan ekonomi didefinisikan sebagai peningkatan

dalam kemampuan dari suatu perekonomian dalam memproduksi barang-barang dan jasa-jasa. Pertumbuhan ekonomi berkaitan dengan kenaikan output perkapita, disini ada dua sisi yang perlu diperhatikan yaitu sisi output totalnya (GDP) dan sisi jumlah penduduknya. Output per kapita adalah output total dibagi dengan jumlah penduduk. Pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses, bukan suatu gambaran ekonomi pada suatu saat (Boediono, 2009 : 1).

Pertumbuhan ekonomi merupakan dasar untuk pembangunan berkelanjutan. Pemerintah dapat memperbaiki kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, dengan memprioritaskan: perbaikan infrastruktur; peningkatan pendidikan; pelayanan kesehatan; membangun fasilitas yang dapat mendorong investasi baik asing maupun lokal; menyediakan perumahan dengan biaya rendah; melakukan restorasi lingkungan serta penguatan di sektor pertanian (Saad, 2009) dalam Rizani, dkk, (2011).

### **Pendapatan Asli Daerah**

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. PAD mencerminkan kemandirian suatu daerah dalam memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pendapatan asli daerah setiap daerah berbeda beda. Daerah yang memiliki kemajuan dibidang industri dan memiliki kekayaan alam yang melimpah cenderung memiliki PAD yang lebih besar dibanding

daerah lainnya, begitu juga sebaliknya. Disatu sisi ada daerah yang sangat kaya karena memiliki PAD yang tinggi dan disisi lain ada daerah yang tertinggal karena memiliki PAD yang rendah dalam Rizani, dkk, (2011).

Menurut Halim (2004 : 67) dalam (Arwati dan Hadiati, 2013) pengertian Pendapatan Asli Daerah yaitu:

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, Pendapatan Asli Daerah dipisahkan menjadi empat jenis pendapatan, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah Arwati dan Hadiati, (2013).

### **Dana Alokasi Umum**

DAU adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU Nomor 33 Tahun 2004). DAU diberikan pemerintah pusat untuk membiayai kekurangan dari pemerintah daerah dalam memanfaatkan PAD-nya. DAU dialokasikan dengan tujuan pemerataan dengan memperhatikan potensi daerah, luas daerah, keadaan geografi, jumlah penduduk, dan tingkat pendapatan masyarakat di daerah, sehingga perbedaan antar daerah yang maju dan daerah yang belum berkembang dapat diperkecil Indarti dan Sugiartiana.(2012)

### **Dana Alokasi Khusus**

Dana Alokasi Khusus adalah dana yang bersumber dari pendapatan-pendapatan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membiayai kegiatan khusus yang merupakan urusan daerah sesuai dengan prioritas nasional. DAK diukur dari jumlah penerimaan DAK yang diberikan oleh pemerintah pusat Maryati dan Endarwati, (2010).

### **Dana Bagi Hasil**

Dana ini merupakan dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah berdasarkan angka persentase untuk membiayai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi (UU No.33 Tahun 2004, Tentang *Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah*). DBH yang ditransfer pemerintah pusat kepada pemerintah daerah terdiri dari 2 jenis, yaitu DBH pajak dan DBH bukan pajak (Sumber Daya Alam) Wahyuni dan Adi (2009).

### **Hipotesis**

H1 : pertumbuhan ekonomi berpengaruh terhadap belanja modal.

H2 : pendapatan asli daerah berpengaruh terhadap belanja modal.

H3 : dana alokasi umum berpengaruh terhadap belanja modal.

H4 : dana alokasi khusus berpengaruh terhadap belanja modal.

H5 : dana bagi hasil berpengaruh terhadap belanja modal.

## **C. METODE PENELITIAN**

### **Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini meneliti tentang Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal. Dengan studi Pemerintah Kabupaten/Kota DI Yogyakarta pada periode tahun 2007-2013. Penelitian ini merupakan penelitian empiris dengan menggunakan data sekunder sebagai sumber data yang ada. Pemilihan Pemerintah Kabupaten/Kota DI Yogyakarta sebagai obyek penelitian karena hakekatnya sistem yang berlaku secara nasional, maka sudah cukup mewakili.

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran APBD seluruh Pemerintah Daerah Yogyakarta pada tahun 2007-2013. Berdasarkan kriteria yang dipakai sebagai sampel adalah Kabupaten/Kota DI Yogyakarta yang memiliki pendapatan daerah aktif, dapat membiayai daerahnya sendiri yang mempublikasikan Laporan Realisasi APBD secara konsisten dari tahun 2007-2013.

Teknik pengambilan sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel jenuh. Teknik pengambilan sampling jenuh adalah teknik penentuan sampel bila semua anggota populasi digunakan sebagai sampel. Istilah sampel jenuh adalah sensus dimana semua anggota

populasi dijadikan sampel. Adapun kriteria sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu:

1. Kabupaten atau kota yang mengeluarkan laporan realisasi APBD dengan selama periode 2007-2013 dengan format SAP yang dipublikasikan pada situs [www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id).
2. Data yang disajikan secara lengkap sesuai yang dibutuhkan atau setiap Kabupaten/Kota dengan lengkap mempublikasikan antara tahun 2007-2013.

### **Data dan Sumber Data**

Data penelitian ini menggunakan jenis data sekunder yang dikumpulkan dari dokumen pemerintah daerah di Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi DIY berupa data kuantitatif, yaitu Data Laporan Realisasi Anggaran APBD pemerintah DI Yogyakarta mengenai jumlah realisasi anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), Dana Bagi Hasil, Belanja Modal, dan data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Per Kapita.

### **Metode Pengumpulan Data**

Penelitian ini dilakukan untuk menguji Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus dan Dana Bagi Hasil terhadap Anggaran Belanja Modal, sehingga menggunakan metode dokumentasi. Menurut Indriantoro (2013:146), metode pengumpulan data menggunakan metode dokumentasi, yaitu

salah satu metode pengambilan data yang memuat informasi mengenai suatu subjek, objek atau kejadian masa lalu yang dikumpulkan, dicatat dan disusun dalam arsip.

Data dikumpulkan dari pemerintah daerah di Badan Pusat Statistik (BPS) provinsi DI Yogyakarta melalui situs resmi Dirjen Perimbangan Keuangan Pemerintah Daerah dengan alamat ([www.djpk.depkeu.go.id](http://www.djpk.depkeu.go.id)). Sedangkan sifat data dari penelitian ini adalah kuantitatif, yaitu data yang berupa angka dan bersifat obyektif. Dari laporan realisasi ini diperoleh data mengenai jumlah anggaran Belanja Modal, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dana Alokasi Khusus, Dana Bagi Hasil.

### **Variabel Penelitian**

Variabel dependen dalam penelitian ini adalah belanja modal. Variabel independen dalam penelitian ini adalah pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus, dana bagi hasil.

### **Metode Analisis Data**

Metode analisis data dalam penelitian ini yaitu uji kualitas data yang terdiri dari, uji asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas data; uji heteroskedastisitas; uji multikolinieritas, dan uji hipotesis yang terdiri dari uji analisis regresi berganda; uji koefisiensi determinasi  $R^2$ ; uji t; uji F.

Alat pengujian yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis model regresi berganda dengan formulasi sebagai berikut :

$$BM = a + \beta_1 PDRB + \beta_2 PAD + \beta_3 DAU + \beta_4 DAK + \beta_5 DBH + e$$

dimana:

BM = Belanja Modal

a = Konstanta

PDRB = Produk Domestik Regional Bruto

PAD = Pendapatan Asli Daerah

DAU = Dana Alokasi Umum

DAK = Dana Alokasi Khusus

DBH = Dana Bagi Hasil

e = *error*

#### **D. HASIL PENELITIAN**

##### **Uji Asumsi Klasik**

###### **a. Uji Normalitas Data**

Hasil perhitungan Kolmogorov-Sminov menunjukkan bahwa signifikasinya adalah sebesar 0,561 yang berarti signifikansinya diatas 0,05. Maka dapat disimpulkan bahwa model regresi layak digunakan karena memenuhi asumsi normalitas.

b. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas untuk menguji model regresi apakah terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual suatu pengamatan ke pengamatan lain. Menggunakan uji glejser dimana dalam penelitian ini hasil uji heteroskedastisitas dengan nilai probabilitasnya  $> 0,05$  jadi model regresi tidak terjadi adanya heteroskedastisitas.

c. Uji Multikolinieritas

Hasil pengujian dalam penelitian ini menunjukkan bahwa nilai toleransi  $\leq 0,10$  atau nilai VIF  $\geq 10$ , berarti tidak terjadi adanya multikolinieritas dalam model regresi.

**Uji Hasil Hipotesis**

a. Uji Analisis Regresi Berganda

Dari hasil analisis regresi berganda dipenelitian ini, diperoleh persamaan sebagai berikut :

$$BM = -5812,429 + 2845,285PE - 0,448PAD + 0,303DAU - 0,882DAK + 0,274DBH$$

b. Koefisien Determinasi R<sup>2</sup>

Nilai *Adjusted R Square* sebesar 0,720 yang berarti variabilitas variabel dependen yang dapat dijelaskan variabel independen sebesar 72,0%. Hal ini berarti variabel-variabel independen meliputi pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli

daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil mempengaruhi belanja modal sebesar 72,0% sedangkan sisanya sebesar 28,0% dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

c. Uji Regresi Simultan (Uji F)

Berdasarkan uji F, nilai F hitung sebesar 11,776 dan nilai signifikannya sebesar 0,000 dengan tingkat signifikan 0,05 maka dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan variabel-variabel independen meliputi pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil mempengaruhi secara bersama-sama terhadap variabel belanja modal.

d. Uji t dan Hipotesis

Pertumbuhan ekonomi memperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,848 ( $p=0,012 < 0,05$ ) sehingga  $H_1$  diterima; artinya pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Pendapatan asli daerah memperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar -3,714 ( $p=0,002 < 0,05$ ) sehingga  $H_2$  diterima; artinya pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal.

Dana alokasi umum memperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 6,896 ( $p=0,000<0,05$ ) sehingga  $H_3$  diterima; artinya dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.

Dana alokasi khusus memperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar -2,464 ( $p=0,025<0,05$ ) sehingga  $H_4$  diterima; artinya dana alokasi khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal

Dana bagi hasil memperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 1,407 ( $p=0,179>0,05$ ) sehingga  $H_4$  ditolak; artinya dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap belanja modal

## **E. KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN**

### **Kesimpulan**

Berdasarkan hasil analisis tersebut maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaruh Pertumbuhan ekonomi terhadap belanja modal memperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 2,848 ( $p=0,012<0,05$ ) sehingga  $H_1$  diterima; artinya pertumbuhan ekonomi berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.
2. Pengaruh Pendapatan asli daerah terhadap belanja modal memperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar -3,714 ( $p=0,002<0,05$ ) sehingga  $H_2$  diterima;

artinya pendapatan asli daerah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal.

3. Pengaruh Dana alokasi umum terhadap belanja modal memperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 6,896 ( $p=0,000<0,05$ ) sehingga  $H_3$  diterima; artinya dana alokasi umum berpengaruh positif dan signifikan terhadap belanja modal.
4. Pengaruh Dana alokasi khusus terhadap belanja modal memperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar -2,464 ( $p=0,025<0,05$ ) sehingga  $H_4$  diterima; artinya dana alokasi khusus berpengaruh negatif dan signifikan terhadap belanja modal
5. Dana bagi hasil memperoleh nilai  $t_{hitung}$  sebesar 1,407 ( $p=0,179>0,05$ ) sehingga  $H_5$  ditolak; artinya dana bagi hasil tidak berpengaruh terhadap belanja modal

### **Keterbatasan**

Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan yang memungkinkan dapat melemahkan hasilnya. Beberapa keterbatasan tersebut adalah :

1. Penelitian ini terbatas pada tahun penelitian yaitu 6 tahun pengamatan dari 2007 sampai 2013
2. Keterbatasan penelitian ini yang menjadi tempat penelitian yaitu hanya Kabupaten/Kota yang berada di wilayah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

## **Saran**

Berdasarkan kesimpulan dan keterbatasan yang ada dalam penelitian ini, maka dapat dikemukakan beberapa saran yang dapat dijadikan pertimbangan untuk penelitian lanjutan, yaitu :

1. Bagi Pemerintah Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebaiknya terus mengupayakan agar Dana Bagi Hasil terus ditingkatkan agar dapat mempengaruhi belanja modal.
2. Bagi peneliti mendatang sebaiknya menambah variabel yang diteliti yaitu tidak hanya pertumbuhan ekonomi, pendapatan asli daerah, dana alokasi umum, dana alokasi khusus dan dana bagi hasil terhadap pengalokasian anggaran belanja modal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Ardhani, Pungky. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum, Dan Dana Alokasi Khusus Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal (Studi Pada Pemerintah Kabupaten/Kota Di Jawa Tengah). *Skripsi (dipublikasikan)*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Arwati dan Hadiati. 2013. Pengaruh Pertumbuhan, Pendapatan Asli Daerah dan Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal pada Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Propinsi Jawa Barat. Seminar Nasional Teknologi Informasi dan Terapan 2013.
- Boediono. 2009. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Edisi ketujuh. BPFE-Yogyakarta. Yogyakarta.
- Ghozali, Imam. 2011. *Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS*. Semarang : Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Harahap, Alfian. 2010. Pengaruh Dana Bagi Hasil Pajak dan Dana Sumber Daya Alam terhadap Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota di Sumatera Utara. *Skripsi (dipublikasikan)*. Universitas Sumatera Utara.
- Indarti dan Sugiartana. 2009. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal di Kota Semarang Periode 2005-2009. *Fokus Ekonomi Volume 7 No. 2: 1-15*.
- Maryati dan Endrawati. 2010. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (OAK) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi: Studi Kasus Sumatera Barat. *ISSN 1858-3687 Jurnal Akuntansi & Manajemen Vol 5 No.2 : 68-84*
- Mawarni, dkk. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum, Terhadap Belanja Modal, Serta Dampaknya Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah (Studi Pada Kabupaten dan Kota Di Aceh). *Jurnal Akuntansi. ISSN 2302-0164. Vol.2, No.2, Mei. pp. 19 – 27*.
- Mentayani dan Rusmanto. 2013. Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran Terhadap Belanja Modal Pada Kota dan Kabupaten Di Pulau Kalimantan. *Jurnal InFestasi Vol.5 No.2 Desember : Hal. 91-102*.

- Oktora dan Pontoh. 2013. Analisis Hubungan Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus Atas Belanja Modal Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Tolitoli Provinsi Sulawesi Tengah. *JURNAL ACCOUNTABILITY Vol. 2 No. 1*.
- PP No. 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan.
- PP No. 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Rizani, dkk. 2011. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Daerah, Dana Alokasi Umum Dan Dana Alokasi Khusus Pada Belanja Daerah Pemerintah Kota Di Provinsi Kalimantan Selatan. *JEPMA Vol.10, No. 1 April hal. 19 – 27*.
- Saragih, Juli Panglima. 2003. *Desentralisasi Fiskal dan Keuangan Daerah dalam Otonomi*. Penerbit Ghalia Indonesia.
- Sianipar, Eva Septriani. 2011. Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Dana Perimbangan Terhadap Pengalokasian Belanja Modal Pada Kabupaten/Kota Di Sumatera Utara. *Skripsi (dipublikasikan)*. Universitas Sumatera Utara.
- Situngkir, Anggiat, 2009, Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus terhadap Anggaran Belanja Modal pada Pemko/Pengkab Sumatera Utara. *Tesis (dipublikasikan)*, Medan, Sekolah Pascasarjana Universitas Sumatera Utara.
- Suparmoko, M. 2009. *Ekonomi Publik untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah*. Edisi Pertama, Yogyakarta, Andi.
- Syafitri, Irma. 2009. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Pendapatan Asli Daerah, dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pengalokasian Anggaran Belanja Modal Pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Utara. *Skripsi Sarjana (dipublikasikan)*. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- Undang-undang No.33 Tahun 2004. *tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah*.
- Undang-undang No. 36 Tahun 2008. *tentang Pajak Penghasilan*.
- Wahyuni dan Priyo Hari Adi. 2009. Analisis Pertumbuhan Dan Kontribusi Dana Bagi Hasil Terhadap Pendapatan Daerah (Studi Pada Kabupaten/Kota Se Jawa-Bali). *National Conference UKWMS Surabaya*.

Wandira. 2013. Pengaruh PAD, DAU, DAK dan DBH Terhadap Pengalokasian Belanja Modal. *ISSN 2252-6765.Accounting Analysis Journal 2013*.